

**LAPORAN KINERJA(LKj.)
TRIWULAN I TAHUN 2024**
Eselon III (Sekretaris Kecamatan)



**KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG**

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dapat diselesaikan.

Tersusunnya Laporan ini merupakan informasi Kinerja Kecamatan Lumajang, yang di dalamnya merupakan gambaran capaian kinerja selama kurun waktu Triwulan I. Di dalam laporan ini menjabarkan akan keberhasilan maupun ketidak berhasilan dalam Penyelenggaraan Program dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024- 2026.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang ini disusun. Semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja serta penilaian kinerja.

Lumajang, 22 April 2024

CAMAT LUMAJANG

Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.
NIP. 19701218 199101 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I. PENDAHULUAN	3
2.1. Latar Belakang.....	3
2.2 Maksud dan Tujuan	4
2.3 Gambaran Umum	4
BAB II. AKUNTABILITAS KINERJA	7
2.1. Perjanjian Kinerja	8
2.2. Pengukuran dan Capaian Kinerja.....	8
2.3. Evaluasi dan Analisis Kerja	16
A. Analisis Faktor Keberhasilan Capaian Kinerja.....	16
B. Analisis Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja.....	17
C. Upaya/ Solusi untuk mengatasi hambatan dalam Mencapai Kinerja	17
2.4. Rencana Tindak Lanjut	18
2.5. Tanggapan Atasan Langsung	18
BAB III. PENUTUP.....	19
LAMPIRAN	
1. Dokumen PK.....	20
2. Dokumen Kegiatan.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, yang dimaksud kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Lumajang.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan dipimpin oleh Camat. Dalam pelaksanaan tugasnya Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan, para Kepala Seksi yang secara teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Dalam melaksanakan tugasnya Camat dibantu oleh perangkat kecamatan dan kelurahan. Secara administrasi kewilayahan Kecamatan terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan dan 5 (lima) Desa yaitu :

- a) Kelurahan Citrodiwangsan;
- b) Kelurahan Ditotrunan;
- c) Kelurahan Jogotrunan;
- d) Kelurahan Jogoyudan;
- e) Kelurahan Rogotrunan;
- f) Kelurahan Tompokersan;
- g) Kelurahan Kepuharjo;
- h) Desa Labruk Lor;
- i) Desa Banjarwaru;
- j) Desa Denok;
- k) Desa Blukon; dan
- l) Desa Boreng

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Triwulan I Kecamatan Lumajang Tahun 2024 adalah memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Lumajang yang dilaksanakan dalam Triwulan I sesuai yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan I Kecamatan Lumajang Tahun 2024 adalah :

- a. Sebagai evaluasi dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan dalam Triwulan I Tahun 2024 yang telah dilaksanakan;
- b. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Lumajang khususnya Kecamatan Lumajang;
- c. Dapat mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan dan perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
- d. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan untuk pelaksanaan kegiatan di Triwulan berikutnya.

1.3. Gambaran Umum

Struktur Organisasi Kecamatan Lumajang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/penataan administrasi dan pengelolaan manajemen pemerintahan secara komprehensif ditingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga.

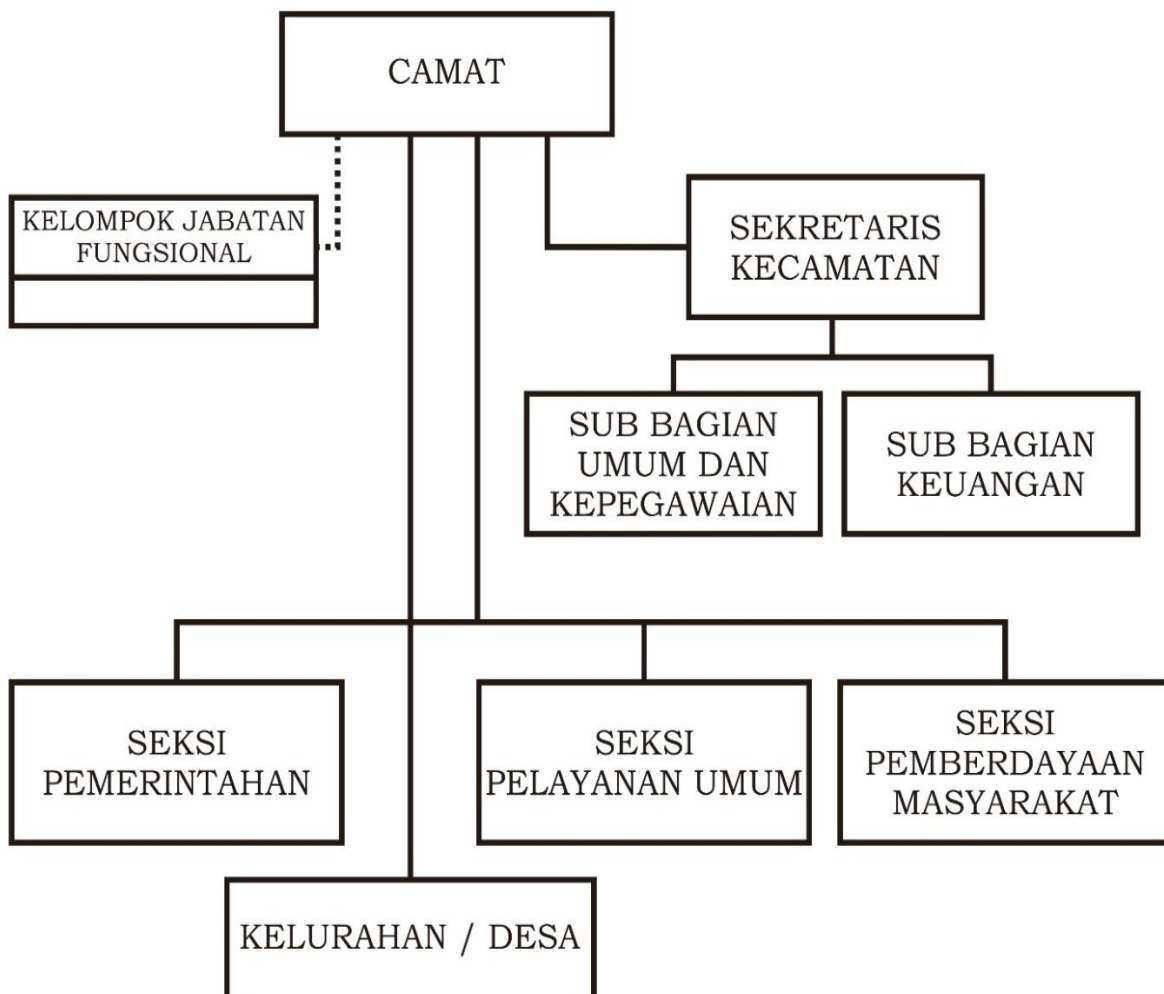
Kecamatan secara hierarki merupakan bawahan bupati sebagai perangkat daerah, maka kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari bupati.

Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Lumajang menggunakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019, yang merupakan perubahan Peraturan Bupati tentang SOTK dari yang semula nomor 86 Tahun 2016 yang telah dirubah menjadi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan yang terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Pelayanan Umum
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

**KECAMATAN LUMAJANG
SESUAI PERATURAN BUPATI LUMAJANG NO 96 TAHUN 2019**



Keterangan : Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Lumajang

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi

1. Penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
2. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
4. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
5. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Kecamatan Lumajang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Lumajang Tahun 2024 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana berikut :

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Eselon III (Sekretaris Kecamatan)

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	100%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%

2.2. PENGUKURAN KINERJA :

- **CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024**

Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang telah menetapkan indikator kinerja utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Lumajang juga melakukan review terhadap indikator kinerja utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Triwulan I Kecamatan Lumajang tahun 2024 menunjukkan hasil sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Sekretaris Kecamatan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Yang ditindaklanjuti	100	43	0,43
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-Rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100	55	0,55

Tabel 2.3

Cost per outcome Sekretaris Kecamatan Tahun 2024 - Triwulan I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Yang ditindaklanjuti	100	43	0,43	7.221.714.333	1.976.599.880	27.37 %	-26.94
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-Rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100	55	0,55	8.100.000	600.000	7.41%	-6.86
A	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100	38	0,4	7.089.003.733	1.938.608.880	27.35	-26.95
I	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100	6,25	0,1	6.630.000	2.750.000	41.48	-41.38
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	1,0	2.750.000	2.750.000	100	-99
2	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8	-	-	3.880.000	-	-	-
II	Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	54,76	0,5	6.578.589.710	1.802.770.651	27.41	-26.90
1	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64	64	1,0	6.528.222.710	1.789.183.651	27.41	-26.90

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
2	Tersusunnya Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	96	24	0,3	48.840.000	12.060.000	24.69	-24.39
3	Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8	4	0,5	1.527.000	1.527.000	100	-99
III	Tepenuhinya fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100	-	-	583.000			
1	Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	-	-	583.000			
IV	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	100	23,33	0,2	111.106.823	51.524.800	46.37	-46.17
1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	8	100	3.989.229	3.968.300	99.47	0.53
2	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32	28	99	29.500.804	27.774.000	94.15	-4.8
3	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	6	50	18.419.790	10.932.500	59.35	9.35
4	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	3	25	8.500.000	2.550.000	30	-5
5	Tersusunnya Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	3	25	50.697.000	6.300.000	12.43	12.57
V	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	100	99	99	9.739.806	9.450.000	97.02	2.9

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	3	100	9.739.806	9.450.000	97.02	2.9
VI	Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	25	25	243.188.000	59.809.579	24.6	0.4
1	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	3	25	59.900.000	14.176.150	23.67	1.33
2	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	3	25	183.288.000	45.633.429	24.9	0.10
VII	Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	25	25	139.166.394	12.303.850	8.84	16.16
1	Terlaksana pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Terbayarkannya Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	3	25	38.568.250	5.603.850	14.53	10.47
2	Terlaksana Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69	39	50	25.600.000	6.700.000	26.17	23.83
3	Terlaksana pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	-	-	74.998.144	-	-	-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
VIII	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	12	3	25	5.175.000	1.425.000	27.54	-2.54
1	Tersusunnya Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	3	25	5.175.000	1.425.000	27.54	-2.54
C	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100	43	43	75.025.600	10.851.000	14.46	-28.54
IX	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100	50	50	52.024.600	3.600.000	6.92	43.08
1	Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	6	100	3.600.000	3.600.000	100	-
2	Tersusunnya Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja	1	-	-	4.500.000	-	-	-
3	Tersusunnya Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	-	-	43.924.600	-	-	-
X	Terlaksananya Fasilitas Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100	23.8	31	23.001.000	7.251.000	31.52	-0.52

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1	Terlaksananya Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	50	50	100	9.000.000	2.250.000	25	75
2	Terlaksananya Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	500	100	20	14.001.000	5.001.000	35.72	-15.72
D	Terlaksananya Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	50	50	44.185.000	23.915.000	54.12	-4.12
XI	Terlaksananya Fasilitas Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	1	50	44.185.000	23.915.000	54.12	-4.12
1	Tersusunnya Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	3	25	38.785.000	23.915.000	61.66	-36.66

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
2	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2	-	-	5.400.000	-	-	-
E	Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	-	-	8.325.000	-	-	-
XII	Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	-	-	8.325.000	-	-	-
1	Tersusunnya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	-	-	8.325.000	-	-	-
F	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100	-	-	8.100.000	600.000	-	-
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100	-	-			-	-
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100	100	-			100	-
XII	Terlaksananya Fasilitas , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	=	-	8.100.000	600.000	7.4	-7.4

(1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (10=6-9)
			Target (4)	Realisasi (5)	% (6=5/4)	Pagu (Rp.) (7)	Realisasi (8)	Capaian (9=8/7)	
1	Tersusunnya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4	-	-	900.000	-	-	-
2	Tersusunnya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	-	-	1.800.000	-	-	-
3	Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pembentukan perangkat desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	-	-	5.400.000	600.000	11.11	-11,11
4	Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat De	1	-	-	5400000	600.000		

Lumajang, 22 April 2024

Sekretaris Kecamatan

MUJIBUR ROHMAN, S.H., M.M.

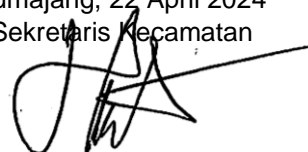
NIP 19680414 199503 1 004

Tabel 2.4

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TW I TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6
SEKRETARIS KECAMATAN					
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan				
	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Yang ditindaklanjuti	Persen	100	43	0,43
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa				
	Rata-Rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Persen	100	55	0,55

Lumajang, 22 April 2024
 Sekretaris Kecamatan



MUJIBUR ROHMAN, S.H., M.M.
 NIP 19680414 199503 1 004

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA :

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada Triwulan I (Satu) tahun 2024, maka dapat dikatakan bahwa 2 (Dua) Indikator kinerja pada sekretaris kecamatan Lumajang telah tercapai dengan tingkatan efisiensi yang baik.

A. ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

a. Indikator Tujuan

- Tetap memberikan pelayanan yang maksimal dengan memperhatikan atau memahami alasan masyarakat melakukan pengurusan adminduk melalui calo;
- Kerjasama yang baik dalam memberikan pengertian secara lisan (saat melaksanakan rakor) ataupun online kepada setiap masyarakat dalam pentingnya dokumen adminduk
- Memaksimalkan pemeliharaan dengan menerapkan skala prioritas
- Koordinasi yang baik antara masyarakat, dan pemberi jasa pelayanan (Kecamatan, Dinas Sosial, dan PT POS Indonesia)

b. Indikator Sasaran

- Koordinasi yang baik oleh tim Kecamatan , TPD /Korcam dan Perangkat Desa
- Kerjasama yang baik dari masing masing personil di Kecamtan Lumajang
- Koordinasi yang baik oleh tim Kecamatan , dan Kelurahan
- Koordinasi yang baik oleh tim Kecamatan , Desa dan Kelurahan

B. ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

a. Indikator Tujuan

- Masih adanya biro jasa pengurusan adminduk di Kecamatan (calo)
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen adminduk
- Sarana prasarana Kecamatan yang masih belum optimal
- Birokrasi yang terlalu panjang dan terkesan berbelit (khususnya pada pencairan santunan kematian)

b. Indikator Sasaran

- Masih terbatasnya SDM Desa yang menguasai bidang adminisitrasi Desa khususnya pembangunan fisik
- Masih kurangnya SDM pada seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Masih belum kooperatif nya Kepala Desa dan Perangkat dalam pelaporan admnisitrasi desa khususnya pajak bumi dan bangunan (PBB)
- Masih belum adanya integrasi pada pelaporan aset dan keuangan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan (masih perekapan secara manual)
- Masih ada desa yang harus selalu diberikan peringatan untuk segera melaksanakan pelaporan administrasi Desa secara tepat waktu

C. UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA

- Meningkatkan upaya penyerapan anggaran sesuai Time Schadule yang sudah di tentukan
- Camat melalui Korcam dan TPD untuk selalu mengingatkan dan memberikan deadline kepada setiap Desa dalam masa pelaporan administrasi Desa

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, tentunya terdapat upaya – upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan sebagai berikut :

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan pelaksanaan kegiatan dalam perihal hambatan – hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja sehingga ada solusi;
2. Melakuakan evaluasi kinerja dalam kegiatan yang belum maksimal untuk biasa ditindaklanjuti lebih lanjut di jajaran pegawai kecamatan Lumajang
3. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi ke jajaran eselon IV

2.5. TANGGAPAN LANGSUNG

RUANG TANGGAPAN/DISPOSISI ATASAN LANGSUNG

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain – lain
<input checked="" type="checkbox"/>	Kinerja dipertahankan
<input type="checkbox"/>

BAB IV PENUTUP

Demikianlah Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Lumajang TW I Tahun 2024 disusun, meskipun masih jauh dalam kaidah – kaidah kepatutan dan kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik dan masukan konstruktif demi menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya untuk OPD Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dimasa yang akan datang.

Mengetahui
Atasan langsung
Camat



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.
NIP 19701218 199101 1 002

Lumajang, 22 April 2024

Sekretaris Kecamatan



MUJIBUR ROHMAN, S.H., M.M.
NIP 19680414 199503 1 004

LAMPIRAN : 1 . DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUJIBUR ROHMAN, S.H., M.M.

Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.

Jabatan : Camat Lumajang

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

PIHAK KEDUA

Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.
NIP 19701219 199101 1 002

PIHAK PERTAMA

MUJIBUR ROHMAN, S.H., M.M.
NIP 19680414 199503 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	100%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%

No	KEGIATAN	Anggaran
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.630.000,-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.578.589.710,-
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	583.000,-
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.106.823,-
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.739.806,-
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.188.000,-
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.166.394,-
9	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5,175,000
10	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-
11	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-
12	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	52,024,600
13	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
14	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	23,001,000
15	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	44,185,000

No	KEGIATAN	Anggaran
16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	8,325,000
17	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8,100,000
	JUMLAH	7,229,814,333

Lumajang, 10 Januari 2024

PIHAK KEDUA



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.
NIP 19701219 199101 1 002

PIHAK PERTAMA



MUJIBUR ROHMAN, S.H., M.M.
NIP 19680414 199503 1 004

LAMPIRAN : 2. DOKUMEN KEGIATAN

NO.	DOKUMENTASI	KETERANGAN
1.		<p>Kegiatan pengucapan sumpah dan janji oleh 8 Tenaga Kontrak Kecamatan Lumajang tahun 2024 yang dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Keputusan oleh Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta TKB.</p>
2.		<p>Kegiatan koordinasi bersama 7 Lurah terkait dengan E-Kinerja (SKP) Lurah dan pejabat atau staf dibawahnya yang harus dikerjakan dengan benar mengingat data dukung yang diupload harus sesuai dengan TC.33.</p>
3.		<p>Kegiatan sosialisasi Aplikasi Srikandi bersama seluruh pejabat dan staf Kecamatan Lumajang.</p>
4.		<p>Kegiatan rutin rapat staf evaluasi terkait kebersihan kantor dan pemenuhan bukti dukung pada SIMAUD (FRC).</p>
5.		<p>Rapat staf terkait kegiatan musrenbang di Kecamatan Lumajang, tentang pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing orang dalam melaksanakan musrenbang tersebut.</p>

LAPORAN KINERJA (LKj.)
TRIWULAN I TAHUN 2024
Eselon IV (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)



KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG

BAB I

PENDAHULUAN

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
- e. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
- f. Melakukan administrasi kepegawaian;
- g. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
- h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit ;
- i. Melakukan administrasi barang milik daerah;
- j. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
- k. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Kecamatan Lumajang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Lumajang Tahun 2024 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana berikut :

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja
Eselon III (Subbag Umum dan Kepegawaian)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%
2	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%
3	Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100%
4	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
5	Terlaksananya Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

2.2. PENGUKURAN KINERJA :

• CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024

Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang telah menetapkan indikator kinerja utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Lumajang juga melakukan review terhadap indikator kinerja utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Triwulan I Kecamatan Lumajang tahun 2024 menunjukkan hasil sebagaimana dalam tabel di bawah ini

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kasi Pelayanan Umum

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Yang ditindaklanjuti	100	43	0,43

Tabel 2.3

Cost per outcome Kepala Sub bagian umum dan kepegawaian Tahun 2024 - Triwulan I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Yang ditindaklanjuti	100	43	0,43	7.221.714.333	1.976.599.880	27.37 %	-26.94
A	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100	38	0,4	7.089.003.733	1.938.608.880	27.35	-26.95
III	Tepenuhinya fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100	-	-	583.000			
1	Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	-	-	583.000			
IV	Tepenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	100	23,33	0,2	111.106.823	51.524.800	46.37	-46.17
1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	8	100	3.989.229	3.968.300	99.47	0.53
2	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32	28	99	29.500.804	27.774.000	94.15	-4.8
3	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	6	50	18.419.790	10.932.500	59.35	9.35
4	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	3	25	8.500.000	2.550.000	30	-5

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
	Tersusunnya Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	3	25	50.697.000	6.300.000	12.43	12.57
V	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	100	99	99	9.739.806	9.450.000	97.02	2.9
1	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	3	100	9.739.806	9.450.000	97.02	2.9
VI	Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	25	25	243.188.000	59.809.579	24.6	0.4
1	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	3	25	59.900.000	14.176.150	23.67	1.33
2	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	3	25	183.288.000	45.633.429	24.9	0.10
VII	Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	25	25	139.166.394	12.303.850	8.84	16.16
1	Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Terbayarkannya Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	3	25	38.568.250	5.603.850	14.53	10.47

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
2	Terlaksana Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69	39	50	25.600.000	6.700.000	26.17	23.83
3	Terlaksana pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	-	-	74.998.144	-	-	-

Lumajang, 22 April 2024

Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian



NOVI MAHERAWATI, SH
Nip. 19771128 2010 2 009

Tabel 2.4
Pengukuran kinerja Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
A	Terselenggaranya fasilitas kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	38%	0,4%
1	Terpenuhinya fasilitas administrasi Barang Milik Daerah	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	100n %	-	-
1.1	Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	-	-
2	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	100%	23,33%	23.3 %
232.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	100 %
2.2	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	28 Paket	99 %
2.3	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	6 Paket	50%
2.4	Tersusunnya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	3 Laporan	25 %
2.5	Tersusunnya Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Laporan	25 %
3	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	99 %	99%
3.1	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	100 %
4	Terpenuhinya fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	25 %	25 %
4.1	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	3 laporan	25 %
4.2	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3 laporan	25%
5	Terpenuhinya fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	25 %	25 %
5.1	Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Terbayarkannya Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	3 Unit	25 %
5.2	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	39 Unit	50 %
5.3	Terlaksananya pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-

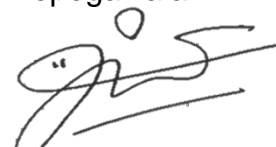
Tabel 2.5

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	583.000	583.000	-	-
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.989.229	3.989.229	3.968.300	99.48 %
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.500.804	29.500.804	27.774.000	94.15 %
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.419.790	18.419.790	10.932.500	59.35 %
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.500.000	8.500.000	2.550.000	5.03 %
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.697.000	50.697.000	6.300.000	12.43 %
7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.739.806	9.739.806	9.450.000	97.02 %
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.900.000	59.900.000	14.176.150	23.66 %
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.288.000	183.288.000	45.633.429	24.90 %
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	38.568.250	38.568.250	5.603.850	14.53 %
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.600.000	25.600.000	6.700.000	26.17 %
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.998.144	74.998.144	-	-

Lumajang, 22 April 2024

Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian



NOVI MAHERAWATI, SH
Nip. 19771128 2010 2 009

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA :

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada Triwulan I (Satu) tahun 2024, maka dapat dikatakan bahwa 1 (satu) sasaran Indikator kinerja pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kecamatan Lumajang telah tercapai namun tetap diperlukan penyempurnaan dalam penyelesaian kegiatan.

A. ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

- Koordinasi dan evaluasi dilaksanakan secara rutin/berkala baik secara langsung maupun online
- Melaksanakan kegiatan monev penilaian kinerja secara online
- Memanfaatkan sarana dan prasana dengan menentukan skala prioritas
- Membangun Lingkungan Kerja yang Kondusif dan menghargai setiap orang yang ada di lingkungan kerja dan berinovasi dalam mengembangkan kreatifitas.

B. ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

- Masih belum terintegrasi untuk pelaporan/pencatatan aset/barang Kecamatan dan kelurahan
- Adanya refocusing dan SB anggaran
- Kurangnya Proaktif desa dan Kelurahan Terhadap Permintaan Data / Laporan

C. UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA

- Meningkatkan upaya penyerapan anggaran sesuai Time Schedule yang sudah di tentukan
- Memahami Tupoksi yang ada dan melaksanakan Tugas dengan Jujur, Tanggungjawab, disiplin dan memiliki Integritas yang tinggi;
- Bertindak yang Proaktif dan produktif
- Memegang teguh Idiologi Pancasila dan UUD 1945
-

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, tentunya terdapat upaya – upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan sebagai berikut :

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan pelaksanaan kegiatan dalam perihal hambatan – hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja sehingga ada solusi;
2. Melakukan evaluasi kinerja dalam kegiatan yang belum maksimal untuk biasa ditindaklanjuti lebih lanjut di jajaran pegawai kecamatan Lumajang
3. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi ke jajaran eselon IV

2.5. TANGGAPAN LANGSUNG

RUANG TANGGAPAN/DISPOSISI ATASAN LANGSUNG

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain – lain
<input checked="" type="checkbox"/>	Kinerja dipertahankan
<input type="checkbox"/>

BAB IV
PENUTUP

Demikianlah Laporan Kinerja (LKj) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Lumajang TW I Tahun 2024 disusun, meskipun masih jauh dalam kaidah – kaidah kepatutan dan kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik dan masukan konstruktif demi menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya untuk OPD Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.

Mengetahui
Atasan langsung
Camat



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.
NIP 19701218 199101 1 002

Lumajang, 22 April 2024

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian



NOVI MAHERAWATI, SH
Nip. 19771128 2010 2 009

LAMPIRAN : 1 . DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NOVI MAHERAWATI,SH

Jabatan : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MUJIBUR ROHMAN, S.H., M.M.

Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

PIHAK KEDUA

MUJIBUR ROHMAN, S.H., M.M.
NIP 19680414 199503 1 004

PIHAK PERTAMA

NOVI MAHERAWATI,SH
NIP 19771128 201001 2 009

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%
2	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%
3	Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100%
4	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
5	Terlaksananya Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Tersusunnya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	583,000	DAU
2	Tersediannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,989,229	DAU
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29,500,804	DAU
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18,419,790	DAU
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8,500,000	DAU
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,697,000	DAU
7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,739,806	DAU
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59,900,000	DAU
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183,288,000	DAU
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38,568,250	DAU
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,600,000	DAU
12	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74,998,144	DAU
	JUMLAH	503.784.023	

Lumajang, 10 Januari 2024

PIHAK KEDUA



MUJIBUR ROHMAN, S.H., M.M.
NIP 19680414 199503 1 004

PIHAK PERTAMA



NOVIMAHERAWATI, SH
NIP 19771128 201001 2 009

LAMPIRAN : 2 . DOKUMEN KEGIATAN

NO.	DOKUMENTASI	KETERANGAN
1.		<p>Kegiatan yang berkaitan dengan proses administrasi kepegawaian, khususnya perpanjangan TKB tahun 2024 yang dilaksanakan di awal Bulan Januari 2024.</p>
2.		<p>Kegiatan evaluasi bersama rekan-rekan kepegawaian di 7 kelurahan terkait dengan E-Kinerja (SKP) Lurah dan pejabat atau staf dibawahnya yang harus dikerjakan dengan benar mengingat data dukung yang diupload harus sesuai dengan TC.33.</p>
3.		<p>Kegiatan sosialisasi Aplikasi Srikandi yang di tahun 2024 mulai banyak mengalami perkembangan dalam fitur aplikasinya, sehingga semua ASN wajib bisa menggunakan Aplikasi Srikandi ini dalam persuratan.</p>
4.		<p>Kegiatan rutin untuk cek inventaris kantor dan semua administrasi yang berkaitan dengan Barang Milik Daerah di Kecamatan Lumajang.</p>

5.		<p>Kegiatan evaluasi terkait dengan pemenuhan bukti dukung pada SIMAUD (FRC) khususnya Indeks Kepatuhan ASN, karena hal ini sangat berpengaruh pada cair tidaknya TPP di Kecamatan Lumajang.</p>
----	---	--

LAPORAN KINERJA (LKj.)

TRIWULAN I TAHUN 2024

Eselon IV (Sub Bagian Keuangan)



**KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- c) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d) Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
- e) Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- f) Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g) Melakukan penyusunan laporan keuangan ;
- h) Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Kecamatan Lumajang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Lumajang Tahun 2024 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana berikut :

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja
Eselon III (Sub bagian Keuangan)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%

2.2. PENGUKURAN KINERJA :

- **CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024**

Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang telah menetapkan indikator kinerja utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Lumajang juga melakukan review terhadap indikator kinerja utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Triwulan I Kecamatan Lumajang tahun 2024 menunjukkan hasil sebagaimana dalam tabel di bawah ini

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Sub Bagian Keuangan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Yang ditindaklanjuti	100	43	0,43

Tabel 2.3

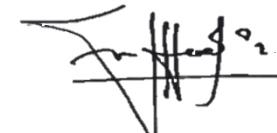
Cost per outcome Kepala Sub bagian Keuangan Tahun 2024 - Triwulan I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Yang ditindaklanjuti	100	43	0,43	7.221.714.333	1.976.599.880	27.37 %	-26.94
A	Terseleenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100	38	0,4	7.089.003.733	1.938.608.880	27.35	-26.95
I	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100	6,25	0,1	6.630.000	2.750.000	41.48	-41.38
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	1,0	2.750.000	2.750.000	100	-99
2	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8	-	-	3.880.000	-	-	-
II	Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	54,76	0,5	6.578.589.710	1.802.770.651	27.41	-26.90
1	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64	64	1,0	6.528.222.710	1.789.183.651	27.41	-26.90

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
2	Tersusunnya Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	96	24	0,3	48.840.000	12.060.000	24.69	-24.39
3	Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8	4	0,5	1.527.000	1.527.000	100	-99

Lumajang, 22 April 2024

Kepala Sub Bagian Keuangan



DWI HARTANTI MAYASARI

NIP.19771101 201001 2 002.SE.

Tabel 2.4
Pengukuran kinerja Kepala Sub Bagian keuangan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
A	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %	38 %	0,4 %
1	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %	6,25 %	0,1 %
1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	35 %
1.2	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	-
2	Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	54,76 %	54 %
2.1	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64Org/12 bln	64Org/3 bln	25 %
2.2	Tersusunnya Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	3 Dokumen	25 %
2.3	Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	6 Laporan	100 %

Tabel 2.5

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.750.000	2.750.000	2.750.000	100 %
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.880.000	3.880.000	-	-
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.528.222.710	6.528.222.710	1.789.183.651	27.41%
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48.840.000	48.840.000	12.060.000	24.69 %
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.527.000	1.527.000	1.527.000	100 %

Lumajang, 22 April 2024
Kepala Sub Bagian Keuangan



DWI HARTANTI MAYASARI
NIP.19771101 201001 2 002.SE.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA :

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada Triwulan I (Satu) tahun 2024, maka dapat dikatakan bahwa 1 (satu) sasaran Indikator kinerja pada Sub Bagian Keuangan kecamatan Lumajang telah tercapai namun tetap diperlukan penyempurnaan dalam penyelesaian kegiatan.

A. ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

- Koordinasi dan evaluasi dilaksanakan secara rutin/berkala baik secara langsung maupun online
- Melaksanakan kegiatan monev penilaian kinerja secara online
- Memaksimalkan SDM yang ada dengan maksimal
- Memanfaatkan sarana dan prasana dengan menentukan skala prioritas
- Membangun Lingkungan Kerja yang Kondusif dan menghargai setiap orang yang ada di lingkungan kerja dan berinovasi dalam mengembangkan kreatifitas.

B. ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

- adanya perbedaan persepsi dalam pengukuran kinerja karena Kelurahan menjadi bagian dari Kecamatan Lumajang
- Adanya efisiensi dalam penganggaran
- Adanya refocusing dan SB anggaran
- Kurangnya Proaktif desa dan Kelurahan Terhadap Permintaan Data / Laporan

C. UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA

- Meningkatkan upaya penyerapan anggaran sesuai Time Schedule yang sudah di tentukan
- Memahami Tupoksi yang ada dan melaksanakan Tugas dengan Jujur, Tanggungjawab, disiplin dan memiliki Integritas yang tinggi;
- Bertindak yang Proaktif dan produktif
- Memegang teguh Idiologi Pancasila dan UUD 1945

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, tentunya terdapat upaya – upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan sebagai berikut :

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan pelaksanaan kegiatan dalam perihal hambatan – hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja sehingga ada solusi;
2. Melakukan evaluasi kinerja dalam kegiatan yang belum maksimal untuk biasa ditindaklanjuti lebih lanjut di jajaran pegawai kecamatan Lumajang
3. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi ke jajaran eselon IV

2.5. TANGGAPAN LANGSUNG

RUANG TANGGAPAN/DISPOSISI ATASAN LANGSUNG

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain – lain
<input checked="" type="checkbox"/>	Kinerja dipertahankan
<input type="checkbox"/>

BAB IV
PENUTUP

Demikianlah Laporan Kinerja (LKj) Sub Bagian Keuangan Kecamatan Lumajang TW I Tahun 2024 disusun, meskipun masih jauh dalam kaidah – kaidah kepatutan dan kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik dan masukan konstruktif demi menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya untuk OPD Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.

Mengetahui
Atasan langsung
Camat



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.
NIP 19701218 199101 1 002

Lumajang, 22 April 2024

Kepala Sub Bagian Keuangan



DWI HARTANTI MAYASARI
NIP.19771101 201001 2 002.SE.

LAMPIRAN : 1 . DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DWI HARTANTI MAYASARI, SE

Jabatan : Kasubbag. Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MUJIBUR ROHMAN, S.H., M.M.

Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

PIHAK KEDUA

MUJIBUR ROHMAN, S.H., M.M.

NIP 19680414 199503 1 004

PIHAK PERTAMA

DWI HARTANTI M, SE

NIP 19771101 201001 2 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,750,000	DAU
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,880,000	DAU
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,528,222,710	DAU
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48,840,000	DAU
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,527,000	DAU
	JUMLAH	6.585.219.710	

Lumajang, 10 Januari 2024

PIHAK KEDUA



MUJIBUR ROHMAN, S.H., M.M.
NIP 19680414 199503 1 004

PIHAK PERTAMA



DWI HARTANTI M, SE
NIP 19771101 201001 2 002

LAMPIRAN : 2 . DOKUMEN KEGIATAN

NO	FOTO KEGIATAN	URAIAN
1		<p>Kegiatan evaluasi Renja bertempat di BAPPEDA tanggal 19 Januari 2024</p>
2		<p>Penyusunan Laporan Perencanaan Dan Kinerja bertempat di Ruang Baca Kantor Kecamatan Lumajang</p>
3		<p>Rapat Staf sekaligus membahas Penyiapan Pertanggungjawaban Keuangan bertempat di Kantor Kecamatan Lumajang pada tanggal 1 April 2024</p>
4		<p>Rapat Staf membahas Evaluasi SINCAN untuk masing2 bagian dan sekaligus membahas Penyusunan Laporan Keuangan tempat di Ruang Baca Kantor Kecamatan Lumajang pada tanggal 28 Mei 2024</p>

**LAPORAN KINERJA (LKj.)
TRIWULAN I TAHUN 2024
Eselon IV (Kasi Pelayanan Umum)**



**KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
3. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
4. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
5. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Kecamatan Lumajang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Lumajang Tahun 2024 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana berikut :

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja
Eselon III (Kasi Pelayanan Umum)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100%
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%

2.2. PENGUKURAN KINERJA :

- **CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024**

Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang telah menetapkan indikator kinerja utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Lumajang juga melakukan review terhadap indikator kinerja utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Triwulan I Kecamatan Lumajang tahun 2024 menunjukkan hasil sebagaimana dalam tabel di bawah ini

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kasi Pelayanan Umum

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Yang ditindaklanjuti	100	43	0,43

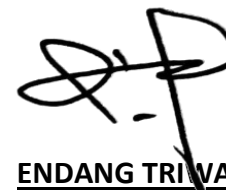
Tabel 2.3

Cost per outcome Kasi Pelayanan umum Tahun 2024 - Triwulan I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Yang ditindaklanjuti	100	43	0,43	7.221.714.333	1.976.599.880	27.37 %	-26.94
B	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kecamatan Sesuai SP dan SOP	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100	3	25	5.175.000	1.425.000	27.54	-2.54
VIII	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	12	3	25	5.175.000	1.425.000	27.54	-2.54
1	Tersusunnya Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	3	25	5.175.000	1.425.000	27.54	-2.54

Lumajang, 22 April 2024

Kepala Seksi Pelayanan Umum


ENDANG TRIWAHYUNI

NIP 19680812 199202 2 004

Tabel 2.4

Pengukuran kinerja kepala seksi pelayanan umum

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
A	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kecamatan Sesuai SP dan SOP	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100 %	33 %	33
1	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100 %	33 %	33
1.1	Tersusunnya Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	3 Dokumen	25 %

Tabel 2.5

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.175.000	5.175.000	1.425.000	27.54 %

Lumajang, 22 April 2024
Kepala Seksi
Pelayanan Umum



ENDANG TRIWAHYUNI
NIP 19681004 199202 2 004

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA :

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada Triwulan I (Satu) tahun 2024, maka dapat dikatakan bahwa 1 (satu) sasaran Indikator kinerja pada Kasi Pelayanan Umum kecamatan Lumajang telah tercapai namun tetap diperlukan penyempurnaan dalam penyelesaian kegiatan.

A. ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

- Tetap memberikan pelayanan yang maksimal dengan memperhatikan atau memahami alasan masyarakat melakukan pengurusan adminduk melalui calo;
- Kerjasama yang baik dalam memberikan pengertian secara lisan (saat melaksanakan rakor) ataupun online kepada setiap masyarakat dalam pentingnya dokumen adminduk
- Memaksimalkan pemeliharaan dengan menerapkan skala prioritas
- Koordinasi yang baik antara masyarakat, dan pemberi jasa pelayanan (Kecamatan, Dinas Sosial, dan PT POS Indonesia)

B. ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

- Masih adanya biro jasa pengurusan adminduk di Kecamatan (calo)
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen adminduk
- Sarana prasarana Kecamatan yang masih belum optimal
- Birokrasi yang terlalu panjang dan terkesan berbelit (khususnya pada pencairan santunan kematian)

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, tentunya terdapat upaya – upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan sebagai berikut :

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan pelaksanaan kegiatan dalam perihal hambatan – hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja sehingga ada solusi;
2. Melakukan evaluasi kinerja dalam kegiatan yang belum maksimal untuk biasa ditindaklanjuti lebih lanjut di jajaran pegawai kecamatan Lumajang
3. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi ke jajaran eselon IV

2.5. TANGGAPAN LANGSUNG

RUANG TANGGAPAN/DISPOSISI ATASAN LANGSUNG

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain – lain
<input checked="" type="checkbox"/>	Kinerja dipertahankan
<input type="checkbox"/>

BAB IV
PENUTUP

Demikianlah Laporan Kinerja (LKj) Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Lumajang TW I Tahun 2024 disusun, meskipun masih jauh dalam kaidah – kaidah kepatutan dan kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik dan masukan konstruktif demi menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya untuk OPD Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.


Mengetahui
Atasan langsung
Camat



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.
NIP 19701218 199101 1 002

Lumajang, 22 April 2024

Kepala Seksi Pelayanan Umum



ENDANG TRIWAHYUNI
NIP 19680812 199202 2 004

LAMPIRAN : 1 . DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ENDANG TRIWAHYUNI
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.
Jabatan : Camat Lumajang

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

PIHAK KEDUA

Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.
NIP 19701219 199101 1 002

PIHAK PERTAMA

ENDANG TRIWAHYUNI
NIP 19680812 199202 2 004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100%
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5,175,000	DAU
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-
	Jumlah	5.175.000,-	-

PIHAK KEDUA



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.
NIP 19701219 199101 1 002

Lumajang, 10 Januari 2024

PIHAK PERTAMA



ENDANG TRIWAHYUNI
NIP 19680812 199202 2 004

LAMPIRAN : 2. DOKUMEN KEGIATAN

**KEGIATAN SIE PELAYANAN UMUM
TRIBUNAL I TAHUN 2024**

NO	FOTO KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN
1.		<p>Aktivitas Pelayanan setiap hari kerja di Ruang Pelayanan Kecamatan</p> <p>Jam Kerja Pelayanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Senin – Kamis : Jam 07.30 – 15.30 ➤ Jum'at : Jam 08.00 – 15.00 <p>Istirahat : Jam 11.00-13.00</p>
2.		<p>Melaksanakan Rapat Staf Intern Pelayanan, evaluasi tugas – tugas tahun 2023, pada tanggal 4 Januari 2024</p>

<p>3.</p>		<p>Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP), terkait adanya perubahan Standar Pelayanan yang dihadiri oleh Kasi Pelayanan dan Staf Kelurahan dan Desa se Kecamatan Lumajang, pada tanggal 8 Januari 2024</p>
<p>4.</p>		<p>Melaksanakan pembinaan ke Kelurahan di wilayah Kecamatan Lumajang dalam rangka persiapan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UP3), pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2024</p>

LAPORAN KINERJA (LKj.)

TRIWULAN I TAHUN 2024

Eselon IV (Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat)



KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG

BAB I

PENDAHULUAN

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
11. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
13. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Kecamatan Lumajang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Lumajang Tahun 2024 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana berikut :

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja
Eselon III (Seksi Pemberdayaan Masyarakat)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%
2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	100%
3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%

2.2. PENGUKURAN KINERJA :

- **CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024**

Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang telah menetapkan indikator kinerja utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Lumajang juga melakukan review terhadap indikator kinerja utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Triwulan I Kecamatan Lumajang tahun 2024 menunjukkan hasil sebagaimana dalam tabel di bawah ini

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Yang ditindaklanjuti	100	43	0,43

Tabel 2.3

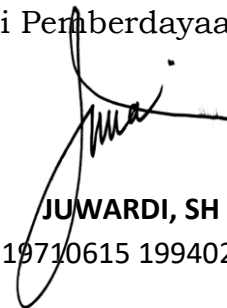
Cost per outcome Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024 - Triwulan I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Yang ditindaklanjuti	100	43	0,43	7.221.714.333	1.976.599.880	27.37 %	-26.94
C	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100	43	43	75.025.600	10.851.000	14.46	-28.54
IX	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100	50	50	52.024.600	3.600.000	6.92	43.08
1	Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	6	100	3.600.000	3.600.000	100	-
2	Tersusunnya Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja	1	-	-	4.500.000	-	-	-
3	Tersusunnya Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	-	-	43.924.600	-	-	-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
X	Terlaksananya Fasilitas Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100	23.8	31	23.001.000	7.251.000	31.52	-0.52
1	Terlaksananya Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	50	50	100	9.000.000	2.250.000	25	75
2	Terlaksananya Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	500	100	20	14.001.000	5.001.000	35.72	-15.72

Lumajang, 22 April 2024

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat



JUWARDI, SH

NIP 19710615 199402 1 001

Tabel. 2.4

Pengukuran Kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

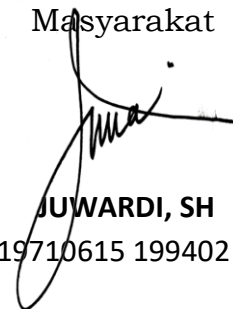
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
A	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100 %	43 %	33%
1	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100 %	50 %	50%
1.1	Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 lembaga	6 lembaga	100%
1.2	Tersusunnya Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja	1 dokumen	-	-
1.3	Tersusunnya Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 laporan	-	-
2	Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan kelga Tingkat Kecamatan	100 %	23 %	23 %
2.1	Terlaksananya Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	200 Keluarga	50 Keluarga	25 %
2.2	Terlaksananya Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	300 keluarga	100 Keluarga	33%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.600.000	3.600.000	3.600.000	100 %
2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan	4.500.000	4.500.000	-	-
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Lumajang	43.924.600	43.924.600	-	-
4	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	9.000.000	9.000.000	2.250.000	25 %

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN
5	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	14.001.000	14.001.000	5.001.000	35.72 %

Lumajang, 22 April 2024

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat



JUWARDI, SH

NIP 19710615 199402 1 001

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA :

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada Triwulan I (Satu) tahun 2024, maka dapat dikatakan bahwa 1 (satu) sasaran Indikator kinerja pada Kasi Pelayanan Umum kecamatan Lumajang telah tercapai namun tetap diperlukan penyempurnaan dalam penyelesaian kegiatan.

A. ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

- Tetap memberikan pelayanan yang maksimal dengan memperhatikan atau memahami masyarakat dalam melakukan pengurusan Pokmas, Bansos dls;
- Kerjasama yang baik dalam memberikan pengertian secara lisan (saat melaksanakan rakor) ataupun online kepada setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan
- Koordinasi dan evaluasi dilaksanakan secara rutin/berkala baik secara langsung maupun online
- Melaksanakan kegiatan monev ke desa - desa terkait dengan dana desa
- Mampu Bekerjasama lintas sector.

B. ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

- Masih terbatasnya SDM Desa yang menguasai bidang adminisitrasi Desa khususnya pembangunan fisik
- Masih kurangnya SDM pada seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Masih ada desa yang harus selalu diberikan peringatan untuk segera melaksanakan pelaporan administrasi Desa secara tepat waktu

C. UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA

- Meningkatkan upaya penyerapan anggaran sesuai Time Schadule yang sudah di tentukan
- Memahami Tupoksi yang ada dan melaksanakan Tugas dengan Jujur, Tanggungjawab, disiplin dan memiliki Integritas yang tinggi;
- Bertindak yang Proaktif dan produktif
- Memegang teguh Idiologi Pancasila dan UUD 1945

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, tentunya terdapat upaya – upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan sebagai berikut :

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan pelaksanaan kegiatan dalam perihal hambatan – hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja sehingga ada solusi;
2. Melakukan evaluasi kinerja dalam kegiatan yang belum maksimal untuk biasa ditindaklanjuti lebih lanjut di jajaran pegawai kecamatan Lumajang
3. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi ke jajaran eselon IV

2.5. TANGGAPAN LANGSUNG

RUANG TANGGAPAN/DISPOSISI ATASAN LANGSUNG

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain – lain
<input checked="" type="checkbox"/>	Kinerja dipertahankan
<input type="checkbox"/>

BAB IV PENUTUP

Demikianlah Laporan Kinerja (LKj) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Lumajang TW I Tahun 2024 disusun, meskipun masih jauh dalam kaidah – kaidah kepatutan dan kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik dan masukan konstruktif demi menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya untuk OPD Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.

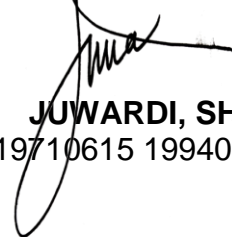
Mengetahui
Atasan langsung
Camat



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.
NIP 19701218 199101 1 002

Lumajang, 22 April 2024

Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat



JUWARDI, SH
NIP 19710615 199402 1 001

LAMPIRAN : 1 . DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : JUWARDI, SH

Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.

Jabatan : Camat Lumajang

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

PIHAK KEDUA

Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.
NIP 19701219 199101 1 002

PIHAK PERTAMA

JUWARDI, SH
NIP 19710615 199402 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%
2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	100%
3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3,600,000	DAU
2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4,500,000	DAU
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43,924,600	DAU
4	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	9,000,000	DAU
5	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	14,001,000	DAU
	Jumlah	75.025.600,-	

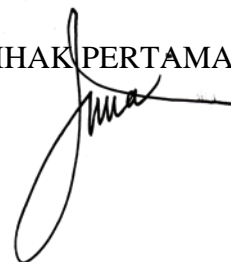
Lumajang, 10 Januari 2024

PIHAK KEDUA



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.
NIP 19701219 199101 1 002

PIHAK PERTAMA



JUWARDI, SH
NIP 19710615 199402 1 001

LAMPIRAN : 2. DOKUMEN KEGIATAN

NO	FOTO KEGIATAN	URAIAN
1		<p>Kegiatan MUSRENBANG RKP Kabupaten Lumajang Tanggal 8 Maret 2024 di Kecamatan Lumajang</p>
2		<p>Mendampingi Monev LKD dari DPM Tanggal 20 Maret 2024 di Desa Blukon</p>
3		<p>Kegiatan PKK (Rapat pleno) Kelurahan dan Desa di Ruang Pertemuan Lantai II Kantor Kecamatan Lumajang Tanggal 10 Januari 2024</p>
4		<p>Kegiatan Pengajian Sakinah dan TP PKK Kecamatan Lumajang Tanggal 26 Maret 2024 di Ruang Raden Pandji Darkosoegondo lantai II Kecamatan Lumajang</p>

5		Kegiatan Posyandu di Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang
---	---	--

**LAPORAN KINERJA (LKj.)
TRIWULAN I TAHUN 2024**
Eselon IV (Kepala Seksi Pemerintahan)



**KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
4. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
6. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
9. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
10. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
11. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
12. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
13. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa
15. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
16. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
17. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
18. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
19. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
20. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegakan batas desa;

21. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
22. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
23. Pemberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
24. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Kecamatan Lumajang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Lumajang Tahun 2024 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana berikut :

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja
Eselon III (Seksi Pemerintahan)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
3	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%

2.2. PENGUKURAN KINERJA :

- **CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024**

Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang telah menetapkan indikator kinerja utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Lumajang juga melakukan review terhadap indikator kinerja utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Triwulan I Kecamatan Lumajang tahun 2024 menunjukkan hasil sebagaimana dalam tabel di bawah ini

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Seksi Pemerintahan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Yang ditindaklanjuti	100	43	0,43
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-Rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100	55	0,55

Tabel 2.6

Cost per outcome Kasi Pemerintahan Tahun 2024 - Triwulan I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Yang ditindaklanjuti	100	43	0,43	7.221.714.333	1.976.599.880	27.37 %	-26.94
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-Rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100	55	0,55	8.100.000	600.000	7.41%	-6.86
D	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	50	50	44.185.000	23.915.000	54.12	-4.12
XI	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2	1	50	44.185.000	23.915.000	54.12	-4.12
1	Tersusunnya Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	3	25	38.785.000	23.915.000	61.66	-36.66

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
2	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2	-	-	5.400.000	-	-	-
E	Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	-	-	8.325.000	-	-	-
XII	Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	-	-	8.325.000	-	-	-
1	Tersusunnya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	-	-	8.325.000	-	-	-
F	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100	-	-	8.100.000	600.000	-	-
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100	-	-			-	-
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100	100	-			100	-
XIII	Terlaksananya Fasilitas , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	=	-	8.100.000	600.000	7.4	-7.4

(1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (10=6-9)
			Target (4)	Realisasi (5)	% (6=5/4)	Pagu (Rp.) (7)	Realisasi (8)	Capaian (9=8/7)	
1	Tersusunnya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4	-	-	900.000	-	-	-
2	Tersusunnya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	-	-	1.800.000	-	-	-
3	Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pembentukan perangkat desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	-	-	5.400.000	600.000	11,11	-11,11
4	Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat De	1	-	-	5400000	600.000		

Lumajang, 22 April 2024

Kepala Seksi Pemerintahan



RIZKA PUSPITASARI, S.STP.

NIP 19940225 201609 2 001

Tabel 2.4

Pengukuran kinerja kepala seksi Pemerintahan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
A	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	50%	50%
1	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Fasilitasi	1 Fasilitasi	50%
1.1	Tersusunnya Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	3 Laporan	25 %
1.2	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Laporan	-	-
B	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	-	-
2	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Fasilitasi	-	-
2.1	Tersusunnya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	-	-
C	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100 %	-	-
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100 %	-	-
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%	100%	100%
3	Terlaksananya Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	-	-
3.1	Tersusunnya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dokumen	-	-
3.2	Tersusunnya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	-	-
3.3	Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pembentukan perangkat desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	-	-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.4	Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	-	-

Tabel 2.5

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	38.785.000	38.785.000	23.915.000	61.66 %
2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.400.000	5.400.000	-	-
3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.325.000	8.325.000	-	-
4	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	900.000	900.000	-	-
5	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.800.000	1.800.000	-	-
6	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.400.000	5.400.000	600.000	11,11 %

Lumajang, 22 April 2024,

Kepala Seksi Pemerintahan

RIZKA PUSPITASARI, S.STP.

NIP 19940225 201609 2 001

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA :

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada Triwulan I (Satu) tahun 2024, maka dapat dikatakan bahwa 1 (satu) sasaran Indikator kinerja pada Kasi Pelayanan Umum kecamatan Lumajang telah tercapai namun tetap diperlukan penyempurnaan dalam penyelesaian kegiatan.

A. ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

- Koordinasi yang baik oleh tim Kecamatan , TPD /Korcam dan Perangkat Desa
- Kerjasama yang baik dari masing masing personil di Kecamtan Lumajang
- Koordinasi yang baik oleh tim Kecamatan , dan Kelurahan
- Koordinasi yang baik oleh tim Kecamatan , Desa dan Kelurahan
- Mampu Bekerja sama lintas sector
- Bertindak Proaktif dan Produktif dalam upaya meningkatkan Inovasi dan pengembangan Kreativitas
- Memegang Teguh Idiologi Pancasila dan UUD 1945

B. ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

- Masih belum kooperatif nya Kepala Desa dan Perangkat dalam pelaporan admnisitrasi desa khususnya pajak bumi dan bangunan (PBB)
- Masih ada desa yang harus selalu diberikan peringatan untuk segera melaksanakan pelaporan administrasi Desa secara tepat waktu
- Adanya anggaran yang terkena Self Blocking
-

C. UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA

- Meningkatkan upaya penyerapan anggaran sesuai Time Schadule yang sudah di tentukan
- Memahami Tupoksi yang ada dan melaksanakan Tugas dengan Jujur, Tanggungjawab, disiplin dan memiliki Integritas yang tinggi;
- Bertindak yang Proaktif dan produktif
- Memegang teguh Idiologi Pancasila dan UUD 1945

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, tentunya terdapat upaya – upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan sebagai berikut :

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan pelaksanaan kegiatan dalam perihal hambatan – hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja sehingga ada solusi;
2. Melakukan evaluasi kinerja dalam kegiatan yang belum maksimal untuk biasa ditindaklanjuti lebih lanjut di jajaran pegawai kecamatan Lumajang
3. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi ke jajaran eselon IV

2.5. TANGGAPAN LANGSUNG

RUANG TANGGAPAN/DISPOSISI ATASAN LANGSUNG

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain – lain
<input checked="" type="checkbox"/>	Kinerja dipertahankan
<input type="checkbox"/>

BAB IV
PENUTUP

Demikianlah Laporan Kinerja (LKj) Seksi Pemerintahan Kecamatan Lumajang TW I Tahun 2024 disusun, meskipun masih jauh dalam kaidah – kaidah kepatutan dan kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik dan masukan konstruktif demi menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya untuk OPD Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.

Mengetahui
Atasan langsung
Camat



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.
NIP 19701218 199101 1 002

Lumajang, 22 April 2024

Lumajang, 22 April 2024
Kepala Seksi Pemerintahan



RIZKA PUSPITASARI, S.STP.
NIP 19940225 201609 2 001

LAMPIRAN : 1 . DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RIZKA PUSPITASARI, S.STP

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.

Jabatan : Camat Lumajang

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

PIHAK KEDUA

Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.
NIP 19701219 199101 1 002

PIHAK PERTAMA

RIZKA PUSPITASARI, S.TP
NIP 19940225 201609 2 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
3	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100%
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	38,785,000	DAU
2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5,400,000	DAU
3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8,325,000	DAU
4	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	900,000	DAU
5	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1,800,000	DAU
6	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5,400,000	DAU
	Jumlah	60.610,000	


Lumajang, 10 Januari 2024

PIHAK KEDUA



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.
NIP 19701219 199101 1 002

PIHAK PERTAMA



RIZKA PUSPITASARI, S.TP
NIP 19940225 201609 2 001

LAMPIRAN : 2. DOKUMEN KEGIATAN

	<p>Apel Gelar Pasukan Satlinmas Persiapan Pengamanan Pemilu Serentak Tahun 2024. Dihadiri oleh seluruh Satlinmas yang akan melakukan pengamanan di setiap TPS yang ada di Kecamatan Lumajang</p>
	<p>Pembinaan kepada Ketua RT/RW se Kecamatan Lumajang persiapan Pengamanan Pemilu Serentak Tahun 2024. Dihadiri oleh Kapolsek Lumajang dan perwakilan danramil 0821/01 Lumajang.</p>
	<p>Sosialisasi dan Pembinaan kepada Anggota Satlinmas persiapan Pengamanan Pemilu Serentak Tahun 2024. Dihadiri oleh Kapolsek Lumajang, Danramil 0821/01 Lumajang dan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.</p>
	<p>Pembinaan dan Pengawasan Kepada Perangkat Desa mengenai Administrasi dan Keuangan Desa. Dilanjutkan Sosialisasi Peraturan Meteri Keuangan Nomor 145 dan 146 tentang Administrasi Keuangan Desa. Dihadiri oleh Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Pendamping Desa dan Pendamping Profesional Desa.</p>



Peninjauan lokasi oleh Pj. Bupati Lumajang yang terdampak bencana Banjir di Kelurahan Rogotruran tepatnya RW 06, RW 07 dan RW 08 melalui pemantauan dari Jembatan Jagalan mengenai rumah dan fasilitas umum yang rusak terdampak banjir. Dalam kegiatan ini didampingi oleh Dinas terkait seperti Asisten Pemerintahan, Satpol PP, BPBD, Dinas PUTR Provinsi, Dinas PU Kabupaten, Camat Lumajang dan Lurah Rogotruran



Koordinasi bersama Forkopimca yaitu Kapolsek Lumajang dan Danramil 0821/01 Lumajang membahas ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat yang ada di Kecamatan Lumajang. Dihadiri oleh seluruh Lurah dan Kepala Desa se- Kecamatan Lumajang.



Kegiatan pendampingan kunjungan Pj. Bupati Lumajang mengenai dialog bersama tokoh Agama dan tokoh masyarakat.

❖ **DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA**